

Hibriditas Budaya Jawa dan Budaya Barat di Museum Keraton Yogyakarta

The Hybridity of Java and West Culture in the Yogyakarta Keraton Museum

Bagus Aji Waskyto Sugiyanto

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Jalan Dalem Mangkubumen, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta 55132, Indonesia
Email: bagusajy89@gmail.com

Abstract

Museum artifacts should not be seen only from a recreational perspective but must also be seen historically and socially. The establishment of museum in Yogyakarta cannot be separated from the spirit of the Java Institute's orientalism. Yogyakarta Keraton (Palace) Museum is the first museum established by local people. This is where the western and eastern cultures meet and negotiate to produce identity hybridization. This study aims to determine the negotiation process of Western and Javanese culture in the creation of hybridized identities in the Yogyakarta Keraton Museum. This study used a qualitative method that focused on the search for the meaning of data obtained from phenomena. The research findings show that this process of intersection between western and local culture produces a process of cultural mimicry which is a form of resistance. MKY's mimicry process at Sonobudoyo Museum is the conception that a museum is an exhibition space for power. The difference is, if the Java Institute uses the Sonobudoyo Museum as a space for power over eastern cultural knowledge, in MKY it is the power room over the east (Java) which is parallel to the West (colonial). Hybridization of Javanese and Western identities produces a Modern Javanese identity.

Key words: museum artifacts, hybridization, culture

Abstrak

Artefak museum tidaklah cukup dilihat dari kacamata rekreasional tetapi juga harus dipandang secara historis dan sosial. Pendirian museum di Yogyakarta tidak lepas dari semangat orientalisme *Java Institute*. Museum Keraton Yogyakarta adalah museum pertama yang didirikan oleh masyarakat lokal. Di sinilah persinggungan budaya Barat dan Timur bertemu dan bernegosiasi hingga menghasilkan hibridisasi identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses negosiasi budaya Barat dan Jawa dalam penciptaan hibridisasi identitas dalam museum Keraton Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memfokuskan pencarian makna akan data yang didapat dari fenomena. Temuan penelitian memperlihatkan proses persinggungan Barat dan lokal ini menghasilkan sebuah proses mimikri kebudayaan yang merupakan bentuk resistensi. Proses mimikri MKY pada *Museum Sonobudoyo* adalah konsepsi atas museum dan merupakan ruang pameran atas kekuasaan. Perbedaannya adalah, jika *Java Institute* menggunakan *Museum Sonobudoyo* sebagai ruang kuasa atas pengetahuan budaya ketimuran, dalam MKY adalah ruang kuasa atas Timur (Jawa) yang sejajar dengan Barat (kolonial). Hibridisasi identitas antara Jawa dan Barat ini menghasilkan identitas Jawa Modern yakni bentuk identitas Jawa yang telah mengalami modifikasi bentuk.

Kata kunci: artefak museum, hibriditas, budaya

PENDAHULUAN

Museum bukanlah ruang yang netral, karena di dalamnya terdapat bahasa. Bahasa yang digunakan sebagai politik penandaan. Begitulah kesimpulan penulis usai membaca hasil observasi Benedict Anderson (yang lebih akrab dipanggil Om Ben oleh akademisi Indonesia) di Museum Yani yang berada di Jakarta. Museum yang dulunya merupakan kediaman Achmad Yani dibangun untuk mengenang jasa mantan panglima tentara Indonesia yang terbunuh pada peristiwa 1 Oktober 1965. Jika dilihat saat ini hampir tidak terlihat lagi bahwa museum tersebut dulunya adalah kediaman Ahmad Yani. Seperti yang dianalisis Om Ben berikut:

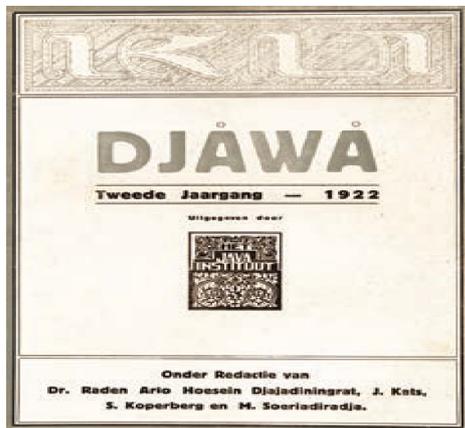
“karena kenyataan bahwa museum itu adalah rumah, yang telah diubah menjadi monumen dengan dua tipe perubahan yang saling bertentangan. Pertama, beberapa barang kenang-kenangan telah diletakkan di monumen ini: senjata yang digunakan untuk mengeksekusi pemimpin komunis, D.N Aidit, yang berada di lemari kaca di atas tempat tidur Yani, tempat jatuhnya Yani diberi suatu papan prasasti yang ditanam di lantai marmer, dan sebagainya. Kedua, hampir semua milik Yani yang istimewa dan personal telah disingkirkan. Dinding rumah itu dihiasi dengan barisan foto bertanda tangan dari kunjungan orang-orang terkemuka, hadiah-hadiah yang diberikan kepada Yani pada kunjungan-kunjungannya ke luar negeri, tanda-tanda penghargaan, danencana dari berbagai kesatuan militer Indonesia, seragam-seragam tentara, sedikit lanskap Indis konvensional, beberapa trofi, dan sebagainya.”(2000 : 338-339).

Terdapat bentuk praktek produksi wacana pengetahuan yang dilakukan pemerintahan Soeharto (yang berasal dari militer), yang membuat para pengunjung museum Yani akan mendapat pengetahuan tentang keberhasilan, prestasi, kebijakan dari sosok Ahmad Yani. Padahal sebelumnya bangunan tersebut adalah rumah kediaman yang dipenuhi oleh perabot-perabot yang sifatnya personal. Tetapi karena ada suatu tujuan yang pewacanaan oleh pemerintah, barang-barang personal tersebut diganti dengan *display* yang mendukung wacana tersebut.

Sejarah pendirian museum di pulau Jawa memang tidak jauh dari kekuasaan. Bermula dari sebuah pertanyaan reflektif pasca perang Jawa (1825-1830) oleh pihak Belanda yakni bagaimana bisa masyarakat Jawa yang dikenal memiliki akar kuat kebudayaan Hindu-Budha dan kejawen dapat menggerakkan basis perlawanan menggunakan ideologi Islam? Kekosongan jawaban ini dikarenakan para pejabat kolonial (Belanda) tidak memiliki kemampuan bahasa Jawa. Gericke seorang misionaris—Hindia Belanda mempertegas keadaan dengan memberikan sebuah pertanyaan “Bagaimana dapat menguasai sebuah koloni yang besar jika mereka tidak paham sejarah dan kebudayaan mereka?” (Margana, 2018 : 3). Keadaan ini berbanding terbalik dengan strategi kolonial Inggris pada daerah jajahannya, walau dengan waktu yang tidak lama mereka berhasil membangun lembaga ilmiah untuk melihat kebudayaan daerah kolonialnya. Sebagai contoh, di Malaka, kolonial Inggris mendirikan *Anglo-Chinese College*.

Di awal abad XX cita-cita Gericke akhirnya terwujud, tepatnya 4 Agustus 1919 *Java Institute* didirikan. Lembaga yang diprakarsai oleh hasil Kongres Bahasa Jawa (5-7 Juli 1918) ini merupakan sebuah lembaga yang mengkaji

bahasa dan kebudayaan Jawa, Sunda, Bali, dan Madura (Margana, 2018 : 7). Kongres dihadiri tokoh-tokoh seperti Muhlenfeld, Van Hinlepon Laberton, Hosein Djajadiningrat, Soetama, Tjipto dan Mas Marco. Inisiator kongres ini adalah Pangeran Prangwadono yang kelak menjadi Mangkunegoro VII (Supardi, 2007 : 52). Dalam majalah *Djawa* (harian berbahasa Belanda terbitan *Java Institute*) kongres ini menggunakan Bahasa Belanda sebagai pengantar, hanya Mas Marco yang menolak, ia memilih menggunakan bahasa Melayu (*Djawa*, 1921: 320).



Gambar 1. Majalah *Djawa* yang terdapat di Museum Sonobudoyo (Sumber: Katalog Sonobudoyo Sejarah dan Identitas Keistimewaan)

Penggunaan Bahasa Belanda pada waktu itu merupakan hasil dari keputusan Belanda untuk menerapkan kebijakan politik etis (dikenal juga dengan istilah politik balas jasa) di Hindia Belanda. Rickleff menjelaskan tokoh utama pada waktu itu adalah direktur pendidikan etis pertama J.H. Abendanon, yang mendukung pendekatan yang sifatnya elite, yaitu pendidikan bergaya Eropa dan berbahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Lulusan pendidikan ini akan ditempatkan pada pemerintahan Belanda.

Dengan kata lain menciptakan suatu elite yang berterima kasih dan bersedia bekerjasama (Sugiyanto, 2019 : 48). Melihat penjelasan tersebut kita mengetahui alasan Mas Marco menolak menggunakan Bahasa Belanda sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan tersebut.

Pada perjalanan waktu *Java Institute* memprakarsai museum pertama di Yogyakarta, yaitu *Museum Sonobudoyo* (Sapardi, 2013: 42). Menurut David Boswell, terdapat dua fase kegiatan museologi di abad XX, pertama pada periode abad XVII–XVIII meliputi kegiatan museologi dan bertumpu pada pengumpulan koleksi artefak-artefak oleh dunia Barat yang ditemui di dunia Timur, sedangkan fase kedua (abad XIX) museum merupakan institusi pengetahuan atas geologi, antropologi, sejarah dan sejarah seni (Boswell, 1993: 7). Posisi kolonial Belanda yang sentral atas produksi museum menimbulkan pertanyaan perspektif apa yang dikedepankan? Budaya Timur dilihat dari masyarakat Timur atau sebaliknya Timur dipandang oleh Barat. Menurut Nicholas Mirzoeff kegiatan *Intitute Java* dalam memproduksi museum merupakan *visual colonialism*, ragam artefak seperti foto, lukisan dan koleksi benda-benda seni milik pribumi ditata dalam tatanan kolonial (Katalog Museum Indonesia, 1998: 282). Hal ini sebanding dengan konsep orientalisme dari Edward Said yang mengatakan Timur adalah sebuah dunia yang lepas dari Timur itu sendiri, Timur adalah dunia yang disajikan ala Barat, dicabut (*be alienated*) dan ditata (Said, 1996: 28).

Berbeda dengan *Museum Sonobudoyo*, *Museum Keraton Yogyakarta* (selanjutnya disebut *MKY*) didirikan tanpa ada tanggungan dari pihak *Java Institute*. *MKY* merupakan bagian bangunan istana bagi Kasultanan Ngayogyakarta. Dalam buku Arti

Keraton Yogyakarta K. P. H Brongtodiningrat menjelaskan kata Keraton berasal dari kata-kata “ka”, “ratu”, dan “an”, dapat juga disebut kadaton atau tempat datu-datu (ratu-ratu), yang jika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi Istana (Brongtodiningrat, tanpa tahun: 7). Pendirian museum ini terjadi pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (Katalog Museum Indonesia, 2018:30). Dari data tersebut seakan-akan tidak terlihat adanya benang merah antara *Java Insitute* dengan *MKY* tetapi sebenarnya terdapat fakta yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang mesra di antara keduanya yaitu, sumber pendanaan *Java Insitute* yang dialiri juga oleh dana Keraton Yogyakarta dan tokoh yang meresmikan *Museum Sonobudoyo* adalah Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (sekaligus menjadi pelindung museum). Tidak hanya itu, Sultan juga menghibahkan sebidang tanah di sebelah Alun-alun Lor (utara) untuk pembangunan museum (Sapardi, 2013: 42).

Menurut Tadao, museum memiliki peran sebagai agen yang berguna untuk menyebarkan “pengetahuan” tertentu (Tadao, 2001:3). Melalui ruang-ruang pertunjukannya, museum memiliki sarana untuk menampilkan sebuah “pengetahuan”. Jika menilik pada *MKY* kita tentu tidak bisa jauh-jauh dari Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan dan juga Yogyakarta sebagai salah satu provinsi istimewa di Indonesia. Pada derajat inilah pendapat Evers dan Korff dapat diketengahkan untuk melihat *MKY*, museum merupakan lambang yang dapat menciptakan kesan dan nilai tertentu tentang sebuah kota pada penduduknya ataupun para pengunjung (Evers dan Korff, 2002: 215). Dengan kata lain, redaksi museum akan memuat sejarah tentang ruang kota, dinamika sejarahnya, serta kebudayaan ruang kota tersebut. Dengan demikian museum

memiliki tendensi untuk melakukan produksi makna kepada masyarakat.

Lalu bagaimana dengan *MKY*? Untuk menjawab pertanyaan ini, konsep poskolonialisme dari Homi K. Bhaba dapat diketengahkan. Konsep poskolonialisme dari Edward Said dan Homi K. Bhaba sangat bertolak belakang. Bhaba (2004) melihat pemaknaan wacana kolonial sebagai hal yang multitafsir, polisemik. Pemaknaan yang beragam ini disebabkan model peniruan bangsa-bangsa yang terjajah terhadap model Barat tidaklah hanya bermotif kepatuhan. Tetapi, tindakan masyarakat untuk meniru (*to mimic*) itu dapat berarti ejekan (*to mockery*) terhadap bangsa barat (penjajah). Terdapat proses negosiasi pemaknaan terhadap identitas ini yang membedakan cara pandang Bhaba dengan Said. Proses peniruan budaya tidak saja dilihat dalam kacamata ketundukkan tetapi pada sifat resistensinya. Inilah yang dikatakan Bhaba sebagai hibriditas, sebuah identitas baru oleh yang terjajah yang digunakan untuk melawan penjajah secara budaya (1994: 128-129). Hal tersebut yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan kata lain bagaimana pengaruh budaya dalam representasi identitas di *MKY*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki titik fokus pada pencarian makna dalam data, karena penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi pada makna (Sugiyono, 2008: 9). Prosedur dalam metode ini adalah mengumpulkan data deskriptif berupa observasi artifak-artifak di *MKY*, wawancara, penelusuran dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah arkeologi dan genealogi

Michel Foucault. Arkeologi merupakan upaya untuk menyibak suatu sistem dan model pemikiran dalam sejarah masyarakat tertentu, lalu menelaah silsilah dan perkembangan sistem dan model pemikiran tersebut, yang disebut Foucault sebagai genealogi (Foucault, 1972 : 128). Yang dianalisis dalam metode ini adalah wacana atau *general domain of statement* (Foucault, 1972 : 80). Dari penjelasan Foucault dapat dipahami bahwa wacana terkadang menjadi domain umum dari segala pernyataan, terkadang sebagai pernyataan dari sekelompok individu, dan terkadang sejumlah praktik kebijakan bagi beberapa pernyataan. Karena itu dibutuhkan sebuah kode kebenaran untuk dapat menjadi sebuah legitimasi kuasa. Penelitian ini hanya menggunakan analisis *statement* atau unit terkecil dalam suatu wacana pada metode arkeologi dan genealogi (lihat Andersen, 2003).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perspektif analisis wacana Foucault dimana pengumpulan data baik teks ataupun hasil wawancara merupakan *a regulated statement* (Foucault, 1972: 80). Analisis *statement* memiliki 4 fungsi analisis, 1) formasi objek (sebagai contoh, Hammengkubuwono IX dibicarakan dengan identitas Jawa atautkah Indonesia); 2) formasi subjek atau *enunciative modalities* (siapa yang berbicara dan apa kapasitasnya); 3) formasi konsep (misal Jawa modern, keistimewaan Yogyakarta); dan 4) formasi strategi (bagaimana tercipta korelasi antar *statement*) (Foucault, 1972 : 40 -80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada MKY terbagi menjadi 4 bagian ruang museum. Pertama, Museum Raden Saleh atau lebih terkenal sebagai Museum Lukisan Tiga Dimensi, sangat disayangkan museum ini

sedang mengalami renovasi sehingga peneliti tidak dapat memasukinya. Kedua, Museum Batik yang berisi koleksi kain batik, topeng batik dan foto-foto penggunaan kain batik (seperti pada acara upacara Keraton). Ketiga Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang berisi koleksi barang-barang pribadi milik HB IX termasuk lukisan dan foto (HB IX memiliki ketertarikan tentang dunia fotografi). Keempat, adalah Museum Kristal dan Kerajinan, berisi berbagi koleksi kristal milik Keraton. Dari ketiga ruang museum tersebut memang hanya ruang Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX saja yang memiliki dimensi identitas penokohan (HB IX) sedangkan, pada ruang museum yang lain koleksi-koleksi yang dipamerkan lebih banyak berisi artifak dalam bentuk kerajinan (olah tangan), seperti porselin, kristal dan kayu. Di sinilah nuansa-nuansa orientalisme *Java Insitute* masih menghantui. Secara samar-samar terlihat modernitas/kemajuan pada koleksi-koleksi museum.

Sejenak kita kembali pada sambutan Hosein Djajadiningrat dan HB VIII saat pembukaan museum *Sanabudaya* yang mengatakan, "*Te geven een algemeen beeld vande hedendaagsche Soendanesche, Javanesche, Madoeresche en Balinesche Culturen in hun Histtorische Ontwikkeling en huidigen toestand*". (Bahwa museum didirikan untuk memperoleh gambaran umum tentang perkembangan kebudayaan Sunda, Jawa, Madura, dan Bali dalam kondisinya saat ini). Sedangkan HB VII memberikan sambutan, "*Museum ini tidak sedikit artinya bagi kemadjoean kultur Bumipoetra, lebih-lebih oentoek kesenian dan batjaan boekoe-boekoe.*" (Margana, 2018: 11). Dari kedua pernyataan tersebut kita dapat melihat sebuah konsep kemajuan/modernitas suatu budaya. Meminjam

konsep Nicholas Mirzoeff, orientalisme melalui museum dapat dikatakan sebagai *visual colonialism* sifatnya tidak destruktif seperti peperangan tetapi produktif (menciptakan pengetahuan). Tetapi permasalahannya adalah budaya tidaklah dipandang melalui kaca mata pribumi/lokal tetapi Barat.

Proses mimikri *MKY* pada *Museum Sonobudoyo* adalah konsepsi atas museum merupakan ruang pameran atas kekuasaan. Perbedaannya adalah, jika *Java Institute* menggunakan *Museum Sonobudoyo* sebagai ruang kuasa atas pengetahuan budaya ketimuran, dalam *MKY* adalah ruang kuasa atas Timur (Jawa) yang sejajar dengan Barat (kolonial). Yang menciptakan sebuah identitas *hybrid* yaitu, Jawa modern atau Jawa yang sudah maju. Pada konsep “kemajuan” dapat dilihat pada koleksi-koleksi yang terdapat di beberapa lokasi museum. Pada Museum Kristal Keraton kita dapat melihat seperti guci pemberian dari Kaisar Jepang, jam berkerangka marmer peninggalan HB VIII yang angka penunjuk jam berhuruf latin, cangklong bergaya Eropa, tempat cerutu berbahan kristal, jam meja bergaya Eropa hadiah dari Belanda, dan beberapa koleksi lain. Koleksi-koleksi tersebut menunjukkan bagaimana Jawa sudah setara dengan budaya lain.



Gambar 2. Beberapa koleksi *MKY*
Sumber: Dokumentasi penelitian

Hibriditas budaya Jawa yang sudah mengalami kemajuan juga dapat dilihat secara jelas di Museum Hammengkubuwono IX (selanjutnya HB IX). Sosok HB IX yang

diperlihatkan secara urutan waktu kehidupannya, mulai dari kecil hingga meninggal, akan kita temui sisi-sisi perubahan dari budaya Jawa menuju kemajuan budaya Barat atau dapat dibahasakan evolusi Jawa modern. HB IX yang bersekolah di Leiden (Belanda) memiliki sikap yang berbeda dengan Raja-Raja Keraton Yogyakarta sebelumnya, bahkan dapat dikatakan radikal. Selama masa revolusi negara Indonesia HB IX lebih sering disebut dengan Bung Sultan, pada saat sedang melakukan kegiatan pramuka HB IX disebut *Kak Sultan*, dan juga sering menggunakan busana pakaian Barat ketimbang budaya adat Jawa. Sikap-sikap inilah yang ingin dimunculkan kembali oleh MYK dengan semangat Jawa yang modern.

Sosok HB IX sebagai gambaran hibriditas (Jawa Modern) menyentuh pada peta perpolitikan Yogyakarta dengan negara Indonesia. Yogyakarta dulunya merupakan kelanjutan dari dua kerajaan *vorstenlanden*. *Vorstenlanden* secara harafiah berarti wilayah-wilayah kerajaan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Mataram Islam. Sejak perjanjian Giyanti yang diprakarsai oleh pihak Belanda pada tahun 1755 kerajaan Mataram pecah menjadi dua yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta, sedangkan dua *vorstenlanden* lainnya yaitu Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran hal ini didasarkan PP No. 16/SD-1945 ditetapkan sebagai karesidenan dengan arti status kerajaan merdeka dihapus (Poerwokoesoemo 1984: 42-43). Nasib yang berbeda dengan dua kerajaan yang berada di Yogyakarta. Sri Sultan Hammengku Buwono IX (HB IX) dan Paku Alam VIII (PA VIII) bertindak dengan (meminjam diksi Proklamasi Indonesia) tempo secepat-cepatnya. Tindakan tersebut adalah menerbitkan Amanat 5

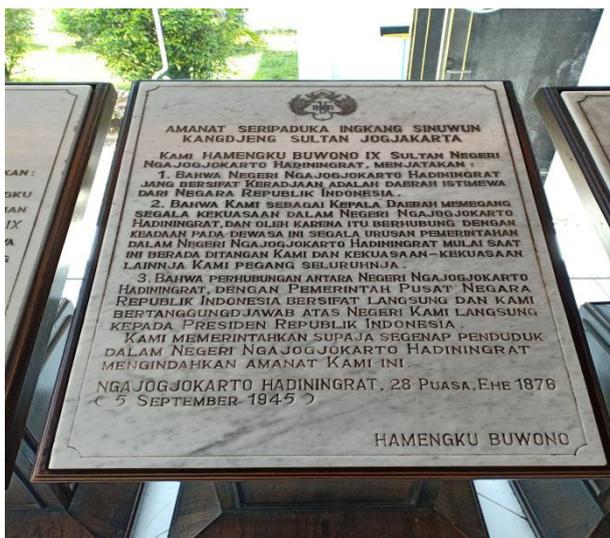
September 1945 yang berisi dukungan untuk Negara Republik Indonesia. Terkait status pemerintahan Yogyakarta pada salah satu butir amanat menyebutkan bahwa Kasultanan dan Paku Alaman merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Semua urusan pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman diselenggarakan sendiri oleh dua kerajaan (1984: 15-16). Majalah *Tempo* pada tahun 1986 menulis rekonstruksi peristiwa maklumat tersebut dengan judul "*Sultan Di Panggung Terbuka*" berikut:

"...Senin malam 18 Agustus itu -- Selasa Pon menurut kalender Jawa -- dengan bulan yang hampir bulat bertengger di angkasa, di gedung kesenian terbuka THR (Taman Hiburan Rakyat) -- yang dibangun di bekas pekuburan Belanda -- Sultan Hamengkubuwono IX dalam pakaian batik cokelat lengan panjang dan jaket hitam, berbicara santai selama satu jam dan kemudian menjawab pertanyaan. Hamengkubuwono IX, 74, berbicara tanpa teks, dalam nada datar dengan suaranya yang berat dan agak serak. Ia, di luar dugaan, ternyata sangat membatasi pembicaraannya, dan hanya bercerita mengenai mengapa ia, segera setelah proklamasi kemerdekaan RI, memilih berpihak dan bergabung dengan republik...Keputusan Sultan memihak RI, di kala masa depan republik baru itu belum pasti, memang suatu keputusan yang sangat bersejarah. 'Saya tahu saya mengambil resiko besar. Ya, kalau kita menang. Kalau kalah saya bisa dibuang atau dibunuh. Risiko itu saya ambil dengan segala keikhlasan hati. Apa yang terjadi terserah kemauan Tuhan,' ujar Sultan Senin malam lalu." (Lutfi dkk, 2014: 15).



Gambar 3. Piagam Penetapan Yogyakarta termasuk Bagian NKRI

Sumber: Dokumentasi penelitian



Gambar 4. Amanat HB IX tentang Penggabungan dengan NKRI

Sumber: Dokumentasi penelitian

Berkaca pada perkataan Sultan HB IX tersebut, tentu kita akan sepakat mengenai sikap yang (menggunakan bahasa HB IX) memiliki “risiko besar”. Sebuah keputusan besar yang (barangkali) tidak memiliki imbas keuntungan bagi pihak Keraton maupun Kadipaten. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pendapat Soenjoto (2011), yang melihat

masa penjajahan Jepang penuh dengan hal-hal kejam telah menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan di kalangan rakyat Indonesia dan mematangkan nasionalismenya, termasuk PA VIII dan HB IX. Keadaan tersebut membuat keduanya tidak lagi berwawasan sempit berjuang untuk kejayaan kerajaan masing-masing, namun sudah berwawasan nasional berjuang demi kejayaan Indonesia (Soenjoto, 2011:114).

Kenyataan yang berbeda oleh dua kerajaan di Surakarta (Pakubawana dan Mangkunegara). Kegagalan para pemimpin lokal dalam memainkan peran-peran penting dalam situasi revolusi membuat mereka kehilangan otoritas kekuasaannya. Hilangnya otoritas itu mengubah status dan kedudukan suatu kekuasaan tertentu di mata rakyatnya. Di Surakarta kedua penguasa tradisionalnya (Pakubuwana dan Mangkunegara) tidak berhasil memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk memainkan peranan positif dalam revolusi. Karena itu mereka tidak dapat menguasai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita bisa menyimak bagaimana gerakan anti swapraja terjadi di sana. Kelompok radikal yang muncul menunjukkan ketidakpercayaan rakyat dengan cara menculik Pakubuwana XII dan berakibat pemindahan kekuasaan yang riil berada di Barisan Banteng. Akhirnya atas desakan Soedirman dan kaum radikal, pada 1 Juni 1946 hak-hak istimewa para raja Surakarta di luar tembok istana dihapuskan, sesuatu yang tidak terjadi di Yogyakarta (Ricklef, 2016: 329-331, Benedict Anderson, 2018: 409-412). Langkah dua kerajaan di Yogyakarta inilah yang membuat masyarakat Yogyakarta memiliki ikatan yang kuat dengan para Raja-Rajanya. Ikatan yang kuat ini membuat otoritas kekuasaan tidak menghilang walaupun bergabung dengan NKRI.

Kejadian Yogyakarta bergabung dengan Negara Indonesia yang monumental ini menciptakan sebuah konsepsi negara dalam negara, bahkan pemandu museum juga berkali-kali menekankan pada aspek tersebut bahwa, Yogyakarta adalah negara merdeka di dalam Negara Indonesia. Proses pencampuran dua identitas politik ini memunculkan hibriditas lokal dan nasional dalam konteks kota Yogyakarta. Posisi Yogyakarta yang sejajar dengan negara Indonesia ini tidak menimbulkan sebuah konflik tetapi keterpaduan antara keduanya. Hibriditas lokal-nasional inilah yang berhasil ditunjukkan MKY dalam sosok HB IX sebagai sosok Jawa Modern. Jawa dengan semangat feodalisme tetap dapat beradaptasi dengan nasionalisme negara Indonesia.

KESIMPULAN

Museum Keraton Yogyakarta (MKY) sebagai museum pertama di Yogyakarta yang dihasilkan oleh masyarakat lokal ternyata tidak lepas dari bayang-bayang hegemonik orientalisme *Java Institute*. Proses persinggungan Barat dan lokal ini menghasilkan sebuah proses mimikri kebudayaan yang merupakan bentuk resistensi. Hibriditas identitas Jawa dan Barat menghasilkan identitas Jawa Modern.

Praktik Hibriditas dapat dilihat pada koleksi-koleksi artefak dari berbagai negara lain yang terdapat di beberapa lokasi museum seperti guci pemberian dari Kaisar Jepang, jam berkerangka marmer peninggalan HB VIII yang angka penunjuk jam berhuruf Latin, cangklong bergaya Eropa, tempat cerutu berbahan kristal, jam meja bergaya Eropa hadiah dari Belanda dan lain sebagainya. Dari *statement-statement* tersebut menghasilkan wacana bahwa Jawa adalah budaya yang sudah setara dengan budaya

lain. Walaupun Jawa di sini bukan Jawa otentik tetapi Jawa modern.

Sosok HB IX yang memiliki “penampakan” ala Barat dari gaya hidup, pendidikan, jaringan pertemanan dan kebijakan politik juga menunjukkan bagaimana bentuk lain dari hibriditas Jawa modern. Kejadian monumental penggabungan Yogyakarta kepada Negara Indonesia juga menunjukkan bahwa HB IX tidak seperti gambaran feodalisme Jawa pada umumnya. Konsep nasionalisme yang dibawa dari Eropa bukan menjadi penghalang bagi HB IX untuk tetap dapat menerapkan kehidupan untuk berdampingan dengan konsep feodalisme Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, N. A. (2003). *Discursive analytical strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann*. Bristol: Policy Press.
- Anderson, B. R. O. (2018). *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Anderson, B. R. O. (2000). *KUASA-KATA: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Bhaba, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge: London
- Brongtodiningrat, K.P.H. (tahun penerbitan tidak dicantumkan). *Arti Keraton Yogyakarta*. Museum Keraton Yogyakarta.
- Boswell, D. & Evans, J. (ed). (1993). *Representing the Nation A Reader; Histories, Heritage, and Museums*. London and New York: Routledge.

- Dinas Pariwisata Provinsi D.I Yogyakarta. (2019). *Statistik Kepariwisata 2018*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Provinsi D.I Yogyakarta.
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. (2018). *Katalog Museum Indonesia Jilid II*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djawa. (1921). *Het Eerste Congres Voor de Taal-, Land- en Volkenkunde Van Java*. Bijlage B.
- Erkelens, J. (2001). *Java-Institut dalam Foto*. Jakarta: KITLV dan Museum Sonobudoyo Yogyakarta.
- Said, E. W. (1996). *Orientalisme* (Terjemahan Asep Hikmat). Bandung: Pustaka.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge* (Terjemahan A.M. Sheridan Smith). New York: Pantheon Books.
- Luthfi, A. N., Nazir, M. S., Tohari, A., Winda, D. A., & Tristiawan, D. C. (2014). *Keistimewaan Yogyakarta: yang Diingat dan yang Dilupakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Margana, S. (2018). *Sana Budaya: dari Orientalisme hingga Nasionalisme*. Dalam Sonobudoyo - Sejarah dan Identitas Keistimewaan: Katalog Pameran. Yogyakarta: Museum Sonobudoyo.
- Mirzoeff, N. (ed). (1998). *Visual Culture Reader*. London-New York: Routledge.
- Monfries, J. (2015). *A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta* (hlm. xix-xxii). Pasir Panjang: ISEAS Publishing.
- Poerwokoesoemo, S. (1984). *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklef, M.C. (2016). *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soenjoto. (2016). *Dinamika Politik DI Yogyakarta Tahun 1946- 1950*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- Sugiyanto, B, A, W. (2019). Resistensi Pribumi terhadap Kolonial Belanda dalam Novel Salah Asuhan. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 4(1).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supardi, N. (2007). *Kongres Kebudayaan 1918-2003*. Yogyakarta: Ombak.
- Supardi, N. (2013). *Bianglala Budaya Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/UU-Nomor-13-Tahun-2012.pdf>, akses 13 November 2019 pukul 19.56 WIB